

Evaluasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat

Maria Rifana Nanur¹⁾, Sri Kamariyah²⁾

^{1) 2)}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: rifanananur@gmail.com

ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki akses ke air bersih dan sehat yang memadai. Masalah air bersih di desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat mengalami kesusahan dalam mendapatkan air bersih. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa Bangka Lewat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari William N Dunn yang terdiri dari enam kriteria yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pamsimas di desa Bangka Lewat sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, manfaat dari program PAMSIMAS mampu menyalurkan air bersih, serta mampu mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik. Tetapi masih ditemukan kekurangan seperti kurang meratanya pembagian sambungan rumah. Rekomendasi untuk meningkatkan perataan pembangunan Pamsimas dapat dilakukan pada saat musyawarah penentuan prioritas pembangunan dilakukan oleh seluruh elemen pelaksana Pamsimas, hal ini agar tercipta keadilan dan pemerataan pada pembangunan karena diawasi langsung oleh semua pihak terkait.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, PAMSIMAS

ABSTRACT

Water is a basic need for humans, but in reality not everyone has access to adequate clean and healthy water. The problem of clean water in Bangka Lewat village, Kuwus District, West Manggarai Regency is experiencing difficulties in getting clean water. The purpose of this study is to evaluate the Community-Based Drinking Water and Sanitation Supply Program (PAMSIMAS) in Bangka Lewat village. The method used in this study is a qualitative research method. In this study, an evaluation theory from William N Dunn was used which consisted of six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The results of this study show that the pamsimas in Bangka Lewat village has been running well but not optimally, the benefits of the PAMSIMAS program are able to distribute clean water, and are able to change the lifestyle of the community for the better. But there are still shortcomings such as the uneven distribution of house connections. Recommendations to improve the leveling of Pamsimas development can be carried out during deliberations on the determination of development priorities carried out by all elements of Pamsimas implementation, this is so that justice and equity are created in development because it is directly supervised by all related parties.

Keywords: Evaluation, policy, PAMSIMAS

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting untuk semua makhluk yang ada di muka bumi. Kebutuhan akan air harus bisa terpenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta bersifat kontinyu. Dalam pembangunan infrastruktur untuk air minum perlu menyediakan sarana dan prasarana yang terjangkau serta berkelanjutan demi kenyamanan masyarakat, karena penyediaan air bersih dan berkualitas dapat terintegrasi pada pada sektor sanitasi. Dalam kehidupan sehari-hari Air dan sanitasi adalah dua hal yang sangat berbeda, namun dalam pengimplementasiannya kedua hal ini memiliki kesamaan yang tidak dapat dipisahkan. Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak sangat penting untuk kesehatan manusia. Jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka masyarakat dapat hidup sehat dan produktif, serta dapat meningkatkan kesehatan dan gizi. (Shabrina Attifah Huwaida, 2024).

Pasal 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Dalam meningkatkan penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah tentang Program PAMSIMAS, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, pasal 1 ayat 3 dan 5 menyebutkan bahwa “Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan “Membangun serta memperluas sistem fisik (teknis) dan non-fisik (kelembagaan, administrasi, keuangan, peran masyarakat dan hukum) yang terpadu untuk meningkatkan pasokan air minum untuk masyarakat”. Sedangkan pembangunan sanitasi merupakan “usaha untuk meningkatkan dan memperluas kualitas pelayanan pengelolaan limbah padat domestik, air limbah domestik, dan air limbah

lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui perbaikan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang tepat”.

WSLIC-3/PAMSIMAS (Third Water Supply and Sanitation for Low Income Community/Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program dan aksi nyata yang di luncurkan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dalam menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan promosi kesehatan lingkungan agar bisa menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu menurunkan jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50% pada tahun 2015.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat.

Desa Bangka Lewat yaitu Desa Bangka Lewat merupakan salah satu Desa yang di intervensi oleh kegiatan IMB (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) dan menjadi salah satu desa remote (lingkungan jarak jauh) dari empat sasaran desa yang ada di Manggarai barat. Permasalahan yang terjadi di desa Bangka Lewat yaitu, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih dikarenakan letak sumber air yang cukup jauh dari tempat tinggal

warga. Berikut ini tabel jumlah penduduk pengguna program PAMSIMAS dari setiap tahun :

Tahun Berjalan PAMSIMAS

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Penerima Program PAMSIMAS milih KK

	Umum (KU)	Rumahan (SR)	Umum (KU)	Rumahan (SR)	Umum (KU)	Rumahan (SR)	
Lewat 1	-	-	3	-	2	2	76
Lewat 2	-	-	3	-	3	3	103
Lewat 3	-	-	2	-	2	2	82
Jumlah	-	-	8	-	7	7	261

Sumber : Data diolah Peneliti, 2024

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa ditahun 2014 program PAMSIMAS mulai diterapkan di desa Bangka Lewat tetapi programnya belum berjalan dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Lalu pada tahun 2019 mulai diaktif Kembali dengan membuat 8 keran umum dan 7 sambungan rumah, lalu dilanjutkan pada tahun 2021 dengan membuat 7 keran umum dan 7 sambungan rumah. Tetapi persediaan air tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dengan pasokan air yang sedikit menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat dikarenakan kekurangan air bersih.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis ambil judul “Evaluasi Kebijakan Penerapan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pakar Prancis, Lemieux (1995:7), merumuskan kebijakan publik yaitu : *“The product of activities aimed et the resolution of public problem in the environtment by political actors whose relationship are structured. The entire proses evolves over time”* (produk aktivitas-aktivitas yang

dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dye :1981).

Kebijakan publik menurut Riant Nugroho D (2003:51): Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. (Safitri & Hendrayady, 2018)

Menurut Chief J.O.Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“an santioned course af action address to a particular problem or group of related problems that affect society at large”* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

2. Proses Kebijakan Publik

1) Penyusunan Agenda: Dalam mempersiapkan agenda ini, para pengambil kebijakan mendiskusikan permasalahan yang muncul di masyarakat dan menguraikan apakah permasalahan tersebut perlu ditangani. Formulasi Kebijakan: Isu-isu yang sudah ada dan menjadi agenda politik dibahas oleh para pengambil keputusan politik. Suatu masalah didefinisikan untuk menemukan solusi optimal terhadap masalah tersebut.

- 2) Adopsi Kebijakan: Di antara banyak alternatif kebijakan yang diusulkan oleh pembuat kebijakan, salah satu alternatif kebijakan pada akhirnya diadopsi dengan dukungan para aktor (seperti mayoritas legislatif) atau melalui konsensus di antara para *actor*
- 3) Tahap Implementasi Kebijakan: Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang teridentifikasi dilaksanakan oleh unit administratif dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Pada tahap implementasi kebijakan, mungkin ada atau tidak ada dukungan dari pelaksana kebijakan.
- 4) Tahap Evaluasi Kebijakan: Kebijakan yang diterapkan kemudian dievaluasi untuk menentukan sejauh mana keberhasilan kebijakan yang diadopsi berkontribusi terhadap penyelesaian masalah dan mencapai dampak yang diinginkan.

3. Asas kebijakan publik

Berikut adalah beberapa asas penting dalam kebijakan publik:

- 1) Asas Keadilan (*Justice*): Kebijakan publik harus memastikan distribusi manfaat yang adil di antara semua kelompok dalam masyarakat, terutama yang rentan atau terpinggirkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.
- 2) Asas Efektivitas (*Effectiveness*): Kebijakan publik harus dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, kebijakan tersebut harus dapat menyelesaikan masalah yang menjadi alasan dilakukannya kebijakan dan memberikan hasil yang diinginkan.
- 3) Asas Efisiensi (*Efficiency*): Kebijakan publik harus dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan dengan biaya yang minimal. Ini bertujuan untuk mencapai

hasil yang maksimal dengan pengeluaran atau usaha yang seefisien mungkin.

- 4) Asas Transparansi (*Transparency*): Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik harus jelas dan terbuka untuk umum. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas, agar masyarakat dapat memahami alasan dan proses yang mendasari kebijakan tersebut.

4. Definisi evaluasi kebijakan

Menurut Yusuf (2000:3) dalam (Arysyahdi, 2023), evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang di rencanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksud menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya evaluasi ini dapat memperbaiki atau menjadikan suatu perencanaan dapat lebih baik kedepannya.

Menurut Thomas Dye (1987:351) : Pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik seperti pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Situmorang dalam (Amanda, 2020) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan sehingga tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan.

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2007), secara umum evaluasi kebijakan dapat disebut sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut (Dunn, 2003) evaluasi merupakan sebuah tahapan kebijakan publik yang menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan yang

ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan harapan masyarakat dan terbukti efektif memecahkan permasalahan yang ada atau tidak.

5. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (Winarno, 2002: 171-174) terdapat lima dimensi yang harus dipaparkan dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Adanya dampak kebijakan yang terjadi pada masalah publik serta dampak pada masyarakat yang terlibat
- b. Kebijakan memiliki dampak pada suatu keadaan atau suatu kelompok diluar tujuan atau sasaran kebijakan
- c. Suatu kebijakan mungkin akan memiliki dampak pada keadaan sekarang ataupun yang akan datang
- d. Evaluasi juga berkaitan dengan faktor yang lain yaitu biaya langsung untuk pendanaan program kebijakan publik
- e. Biaya tidak langsung akan di tanggung oleh masyarakat atau sebagian anggota masyarakat sebagai dampak adanya kebijakan publik

6. Definisi Program PAMSIMAS

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan Salah satu program wajib yang di keluarkan oleh Pemerintah pusat yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan atau pinggiran kota (peri-urban) untuk menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

7. Tujuan dari program PAMSIMAS yaitu:

- 1) Meningkatkan air bersih dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah di pinggiran kota (peri-urban) dan masyarakat pedesaan.

- 2) Meningkatkan jumlah masyarakat dalam penggunaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah setempat dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
- 4) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana air minum dan sanitasi agar tetap berfungsi dengan baik untuk menambah jumlah penerima manfaat.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2011) dalam (Fadhilah et al., 2023),.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada dasarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan data deskriptif mengenai evaluasi kebijakan penerapan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian merupakan letak dimana dilaksanakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian kali ini peneliti memilih di Desa

Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.

3. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah serangkaian masalah yang disusun untuk menjadi inti atau pusat pembahasan dalam sebuah topik penelitian. Fokus penelitian ini untuk mengetahui evaluasi kebijakan penerapan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.

Pada fokus tersebut akan diteliti menggunakan teori dari William N. Dunn yang mempunyai enam kriteria yakni Efisiensi, Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Adanya fokus penelitian ini memiliki harapan agar penelitian memiliki fokus yang tepat, sehingga mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi kebijakan penerapan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Bangka Lewat Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh William N Dunn, terdapat 6 teori evaluasi kebijakan yang terdiri dari : efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan 6 teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter” (Dunn, 2003:429).

Kriteria efektivitas hasil penelitian menerangkan bahwa Pamsimas dapat

dikatakan telah mencukupi, hal ini dapat dilihat dari program yang mampu menyalurkan air bersih kepada masyarakat serta terlampauinya target yang diinginkan. Tercapainya jumlah orang yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak .Sesuai teori yang digunakan peneliti, pelaksanaan Pamsimas di desa Bangka Lewat telah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini dilihat dari target dan capaian penerima program Pamsimas telah memenuhi target yang sudah ditentukan.

PAMSIMAS di desa Bangka Lewat sudah mampu menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Sejak tahun 2021 PAMSIMAS desa Bangka Lewat menargetkan 128 sambungan rumah untuk masyarakat dan target tersebut tercapai di tahun 2024. Walaupun belum semua masyarakat mendapatkan fasilitas seperti sambungan rumah, tetapi mereka masih bisa mendapatkan akses air bersih.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Hasil penelitian menjelaskan jika kriteria efisiensi pada PAMSIMAS di desa Bangka Lewat dikatakan belum cukup. Realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah sesuai porsinya, tetapi jatah tersebut dinilai kurang untuk pembangunan PAMSIMAS yang perkembangannya tergolong pesat. Penyerapan anggaran

sudah cukup, dengan terbatasnya anggaran yang diberikan PAMSIMAS menyebabkan tidak meratanya pembagian fasilitas dari PAMSIMAS sendiri. Sedikitnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah tersebut membuat tingkat efisiensi dalam mendapat penerima program Pamsimas berkurang.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah” (Dunn, 2003:430).

Pamsimas yang telah di laksanakan di Kecamatan Tembalang telah berhasil memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu, dalam pelaksanaannya juga berjalan lancar. Pelaksana PAMSIMAS sudah dikatakan cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Ini artinya Pamsimas di desa Bangka Lewat sudah memenuhi kriteria kecukupan, terlihat dari PAMSIMAS dapat memuaskan kebutuhan akan air bersih dan sanitasi.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

Perataan dari segi pembangunan sarana dan prasarana PAMSIMAS, seperti saluran pipa air minum, fasilitas sanitasi

dan tower sumber air PAMSIMAS yang digunakan untuk mengalir perpipaan. Selain perataan dalam segi fasilitas, peneliti memfokuskan kriteria perataan pada saat penentuan prioritas pemilihan.

Hasil penelitian pada kriteria perataan belum dikatakan merata, pendirian titik nol sumber air PAMSIMAS sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Tetapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum dapat fasilitas PAMSIMAS, padahal seharusnya mendapatkan bantuan air bersih dan sanitasi, hal ini disebabkan karena sumber dana yang kurang.

Kriteria perataan masih dikatakan belum optimal, karena meskipun sudah semua masyarakat bisa mengubah pola hidup sehat tetapi masih saja banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan fasilitas sambungan rumah tetapi malah belum dapat

5. Responsivitas

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Hasil penelitian PAMSIMAS di desa Bangka Lewat menjabarkan jika PAMSIMAS mengubah gaya hidup bersih pada masyarakat. Masyarakat telah memahami pentingnya gaya hidup bersih, yang telah disosialisasikan PAMSIMAS melalui program-programnya seperti kebiasaan cuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan kebiasaan BABS.

Jadi pelaksanaan Pamsimas dilihat dari segi kriteria responsivitasnya dikatakan sudah tercapai seluruhnya Pamsimas sudah dapat dikatakan berhasil dalam mengubah gaya hidup bersih warga.

6. Ketepatan

Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, program pamsimas dari kriteria ketepatan program ini sudah berjalan, dalam hal ini sudah banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya. Masyarakat sangat mendukung dengan penerapan program ini, mengingat keadaan masyarakat sebelum adanya program pamsimas masyarakat sangat sulit sekali untuk mendapatkan air bersih, terkadang masyarakat harus pergi ke sumber air dengan menempuh jarak yang cukup jauh baru setelah itu mendapatkan air, ini salah satu hal yang mendukung masyarakat dalam penerapan program ini.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait evaluasi kebijakan penerapan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa Bangka Lewat kecamatan kuwus kabupaten manggarai barat, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi program PAMSIMAS di desa Bangka Lewat menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Ditinjau dari enam kriteria tersebut berdasarkan hasil penelitian dilihat ada empat kriteria yang menunjukkan bahwa PAMSIMAS di desa Bangka Lewat sudah berjalan dengan baik seperti efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Dari pembangunan program PAMSIMAS dilihat

dari segi fisik program, seperti pembangunan bak penampungan dan juga saluran air sudah terlaksana dengan baik dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat tetapi masih belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih ada dua kriteria lainnya yang belum berjalan dengan efektif yaitu efisien dan pemerataan karena dari 216 KK yang mendapatkan sambungan rumah hanya 128 KK sementara 133 KK lainnya belum dapat dikarenakan sumber dana yang belum cukup.

2. Rekomendasi

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak pengelola pamsimas kedepannya bisa dimanajementi lebih baik, sehingga hasil serta dampak dari program PAMSIMAS dapat dirasakan oleh semua masyarakat
2. Untuk kedepannya sebaiknya pemerintah desa mengeluarkan surat keputusan untuk sistem pembayaran iuran air agar masyarakat lebih tertib lagi dalam penggunaan air bersih.
3. Sebaiknya kedepannya untuk pihak PAMSIMAS perlu menambahkan sumber daya manusia, dan bila perlu dibuatkan struktur organisasi sendiri agar pembagian pekerjaan bisa lebih teratur sehingga tidak melibatkan pihak pemerintah desa
4. Masyarakat harus selalu terlibat aktif dalam segala kegiatan pemberdayaan terkhusus di bidang air dan sanitasi karena masyarakat yang berperan penting di dalam kegiatan atau program tersebut.

REFERENSI

- Wahab, Solichin Abdul. (2012) . ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Fossmulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara
- Subarsono, AG. (2013) . ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK :Konsep Teori dan Aplikasi. PUSTAKA BELAJAR
- Parsons, Waine. (2008). Public Policy : Pengantar Teori Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana
- Dunn, William N. (2003). PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiono.(2016). METODE PENELITIAN : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA,CV
- Pedoman PAMSIMAS Edisi 2013
- Affitra, R. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) DI DESA BATU PAPAN KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU*. <http://repository.uin-suska.ac.id/77102/>
- Amanda, P. I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 34–38.
- Arysyahdi, R. (2023). Evaluasi Kebijakan Pelayanan e-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2, 575–586. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7466%0Ahttps://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/download/7466/3520>
- Chusniati, S. (2019). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 57–64. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.216>
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press.
- Fadhilah, A., Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., & Sunarya, A. (2023). Evaluasi SMART SOTO Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kepolisian Kepada Masyarakat Kabupaten Lamongann. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(1), 31–45. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i1.6114>
- Hidayati, L. A., Suleman, Z., & Yunindyawati. (2020). Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. *Jurnal Media Sosiologi*, 23(2), 5–6.
- Lintjewas, O. Y. L., Tulus, F., & Egeten, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(April), 19–33.
- Safitri, I., & Hendrayady, A. (2018). EVALUASI PENERAPAN PROGRAM BUS RAPID TRANSIT (BRT) DI KOTA TANJUNG PINANG. *Issn-2354 -5798*, 6(2), 55–64.
- Shabrina Attifah Huwaida, D. M. F. (2024). *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut*. 8(1). <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8618>
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi*

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan*

Publik. Media Prasindo.
Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Prasindo.